

# ANALISIS HUKUM RANGKAP JABATAN PEJABAT PUBLIK DI KONI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

Galuh Mutiara Maulidina\*, Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum., Dr. H. Didik Widitrismiharto, S.H., M.Si.

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

\*Corresponding author : [galuhmutiarams@gmail.com](mailto:galuhmutiarams@gmail.com)

---

**Abstarct** — This study aims to examine and answer problems regarding the dual position of a public official against KONI in terms of Act Number 3 of 2005 concerning the National Sports System. The type of research in legal writing used by researchers is normative juridical. The type of approach used is the statutory approach and the conceptual approach. The data analysis method in this thesis uses qualitative methods, namely by describing the results of the analysis in the form of sentences according to the data that has been obtained and arranged systematically. The results of the research obtained are based on Article 40 of Act Number 3 of 2005 concerning the National Sports System which emphasizes that KONI management is independent, which means that KONI management cannot be bound by public positions and there are no provisions that specifically provide legal consequences to KONI administrators who carry out concurrent positions.

**Keywords** : *Concurrent Position, KONI, Public Official*

**Abstrak**— Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai rangkap jabatan seorang pejabat publik terhadap KONI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Tipe penelitian dalam tulisan hukum yang digunakan oleh peneliti yakni yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konsep (*conceptual approach*). Metode analisis data dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan hasil analisis berbentuk kalimat sesuai data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis. Hasil penelitian yang didapatkan ialah berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan pengurus KONI bersifat mandiri yang artinya pengurus KONI tidak boleh terikat jabatan publik dan tidak ada ketentuan yang secara khusus memberikan konsekuensi hukum kepada Pengurus KONI yang melakukan rangkap jabatan.

**Kata Kunci** : Rangkap Jabatan, KONI, Pejabat Publik